BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sejak dimulainya pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, otonomi dan tanggung jawab fiskal telah beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sumber-sumber daya di daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika kemampuan finansial pemerintah daerah tidak memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan memperluas jangkauan penerimaan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi

fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam laju pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat salah satunya dari laju pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera. Laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014 (persen)

No.	Provinsi	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1.	Aceh	3,28	3,85	2,83	1,65	2,90
2.	Sumatera Utara	6,66	6,45	6,08	5,23	6,11
3.	Sumatera Barat	6,34	6,31	6,02	5,85	6,13
4.	**Riau**	**5,57**	**3,76**	**2,49**	**2,62**	**3,61**
5.	Jambi	7,86	7,03	7,07	7,76	7,43
6.	Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,40	4,68	5,82
7.	Bengkulu	6,85	6,83	5,40	4,68	6,31
8.	Lampung	6,56	6,44	5,78	5,08	5,96
9.	Kepulauan Bangka Belitung	6,90	5,50	5,22	4,68	5,57
10.	Kepulauan Riau	6,96	7,63	7,11	7,32	7,25

Sumber: Diolah dari Katalog BPS: 9302001

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa bahwa Provinsi Jambi memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain yakni sebesar 7,43%. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,25%. Provinsi Bengkulu di posisi ketiga dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,31%. Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13% di posisi keempat. Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,11% di posisi kelima. Provinsi Lampung dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96% di posisi keenam. Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82% di posisi ketujuh. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57% di posisi kedelapan. Provinsi Riau dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,61% di posisi kesembilan. Dan yang berada di posisi terakhir yakni Provinsi Aceh dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,90%.

Provinsi Riau memiliki pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dari tahun 2010-2014, sama halnya dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Provinsi Riau hanya bisa menduduki posisi kesembilan yang merupakan provinsi kedua yang paling terendah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,61%. Provinsi Riau dengan kapasitas fiskal yang tinggi, bahkan tertinggi untuk wilayah Pulau Sumatera dengan indeks 1,1867 pada tahun 2014, serta didukung oleh potensi-potensi sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat bersaing dengan provinsi yang lain dengan cara memaksimalkan keunggulannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diterapkan di provinsi Riau belum dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi agar dapat bersaing dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Provinsi Riau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini dapat diketahui dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 sebagaimana terlihat pada Tabel I.2 berikut:

Tabel I.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
di Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	388.578	--
2011	410.216	5,57
2012	425.626	3,76
2013	436.206	2,49
2014	447.616	2,62

Sumber: Diolah dari Katalog BPS: 9302001

Dari Tabel I.2 dapat diketahui bahwa jumlah PDRB daerah provinsi Riau tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dari tahun 2010-2011, laju pertumbuhan mengalami kenaikan, yakni 5,57%. Akan tetapi kenaikannya berangsur turun di tahun 2012 dengan persentase kenaikan sebesar 3,76% dan di tahun 2013 dengan persentase sebesar 2,49%. Kemudian di tahun 2014 laju pertumbuhan kembali mengalami kenaikan yakni 2,62%. Pertumbuhan ekonominya cenderung positif dan kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Riau.

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan rata-rata distribusi PDRB dapat dilihat pada Gambar I.1.

Gambar I.1
Rata-rata PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

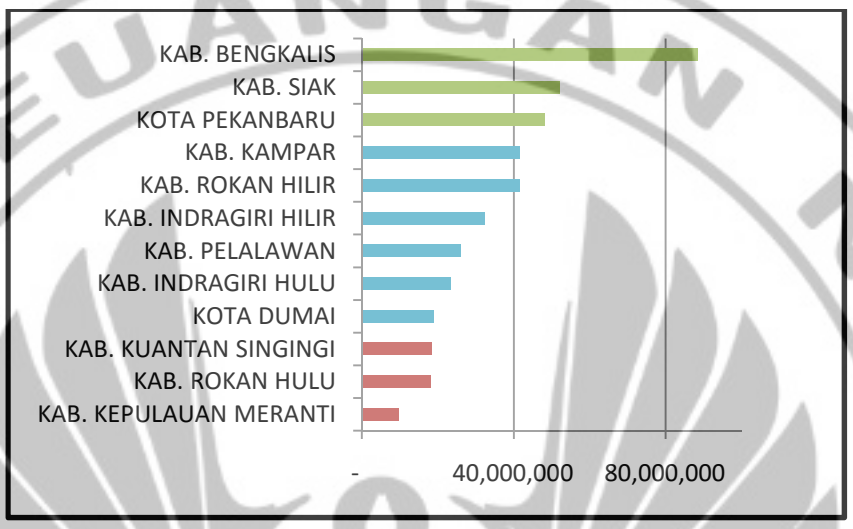

Sumber: Diolah dari Katalog BPS: 9302008.14

Dari Gambar I.1 dapat diketahui bahwa di provinsi Riau, hanya terdapat 3 kabupaten/kota dengan jumlah PDRB diatas rata-rata PDRB yang ada di provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis dengan rata-rata sebesar Rp88.407.569.788.000,00, kemudian Kabupaten Siak dengan rata-rata sebesar Rp52.231.997.160.000,00, dan Kota Pekanbaru dengan rata-rata sebesar Rp48.123.136.234.000,00. Sedangkan rata-rata PDRB terendah dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rata-rata berkisar Rp9.797.848.192.000,00, disusul oleh Kabupaten Rokan Hulu dengan rata-rata Rp18.121.262.096.000,00 dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata sebesar Rp18.391.244.660.000,00. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan di tiap daerah di Provinsi Riau juga belum berjalan dengan baik. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah sehingga pemerintah pusat sebagai pelaku utama kebijakan desentralisasi fiskal perlu memberikan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah perlu ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008, 10). Perkembangan PAD di provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (Persen)
2010	1.700.950.858.456,94	25,77
2011	2.210.130.782.733,83	29,94
2012	2.588.688.445.077,20	17,13
2013	2.725.623.913.109,06	5,29
2014	3.245.087.745.089,53	19,06

Sumber: Diolah dari Riau dalam Angka dari berbagai tahun

Dari Tabel I.3 bisa diketahui bahwa komposisi PAD yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan dari segi jumlah. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 29,94%. Ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah daerah di Provinsi Riau melalui sumber daya asli daerah dapat termanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan PAD sangat penting sekali di dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan dapat mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut menjadi semakin mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Namun, jumlah PAD termasuk rendah jika dibandingkan dengan besarnya DP yang diberikan pusat. Jika proporsi DP tinggi, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dapat menjadi sangat tinggi dan mengurangi kemandirian daerah dalam mengoptimalkan PAD. Perkembangan perimbangan keuangan dari pusat ke daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 Provinsi Riau digambarkan dalam Gambar I.2.

Berdasarkan Gambar I.2 diketahui bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2014 perkembangan DP berfluktuasi. Sumbangan terbesar diperoleh dari porsi DBH. Besarnya DBH pada tahun 2014 mencapai Rp16,44 triliun. Besarnya DBH tersebut

meningkat dari tahun sebelumya yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp11,06 triliun setelah sebelumnya turun dari Rp16,20 triliun pada tahun 2012. Sementara itu porsi DAK terbilang cukup kecil hanya menyumbang sebesar Rp255 miliar pada tahun 2010, yang kemudian berfluktuasi dari tahun ke tahun sampai tahun 2014 sebesar Rp280 miliar. Berbeda dengan transfer DAU yang trennya tetap meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 besarnya DAU mencapai Rp1,96 triliun dan semakin naik hingga mencapai Rp7,09 triliun pada tahun 2014. Gambar I.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014, penerimaan daerah yang bersumber dari DP berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya DP yang tinggi, ketergantungan daerah terhadap DP menjadi sangat tinggi dan kemandirian daerah semakin menurun.

Gambar I.2
Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Riau Tahun 2010-2014

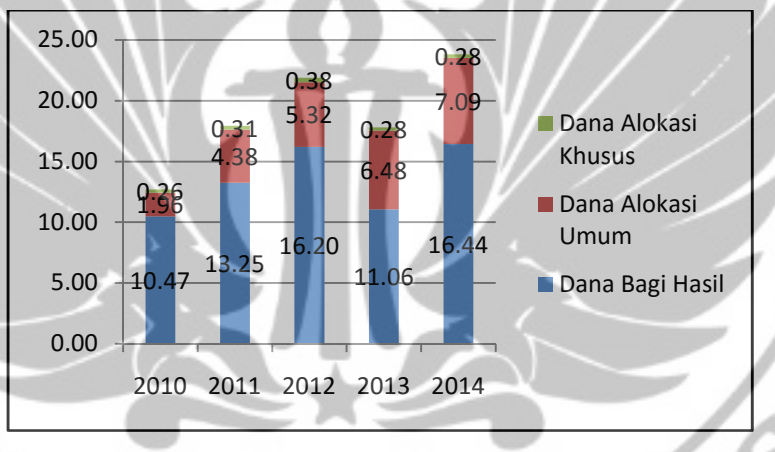

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari berbagai tahun

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan keseluruhan daerah dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat yakni DP yang meliputi DAU, DAK, dan DBH tidak menjadi tolak ukur dalam pendanaan daerah, namun dapat dijadikan motivasi agar daerah tersebut menggali potensi-potensi yang dimiliki dan meningkatkan kemandirian soal pendanaan daerah.

Penduduk yang bertambah dalam suatu daerah akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan jumlah tenaga kerja tersebut akan mengakibatkan suatu daerah terdorong untuk menambah produksinya. Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) yang disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian namun akan berakibat buruk apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Apabila demikian, peningkatan ekonomi yang diharapkan dapat tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja (orang yang bekerja) provinsi Riau dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar I.3.

Gambar I.3
Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja
Provinsi Riau Tahun 2010-2014 (juta jiwa)

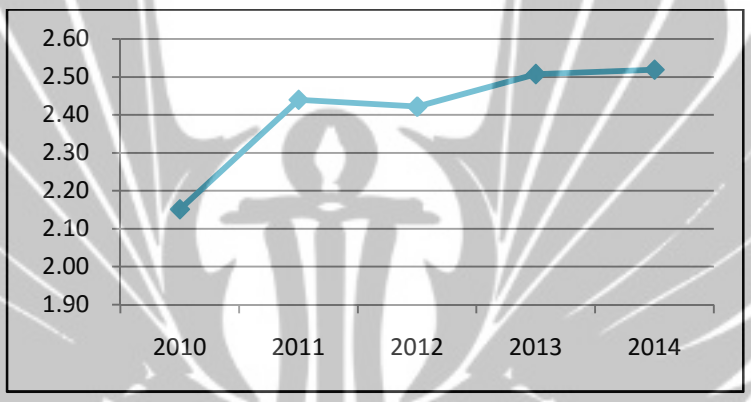

Sumber: Diolah dari Riau dalam Angka dari berbagai tahun

Berdasarkan Gambar I.3 dapat dilihat bahwa perkembangan tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2010-2014 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2011 kenaikannya sebesar 13,38% dan menurun di tahun 2012 sebesar 0,74%. Di dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 3,54% dan 0.45%.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai yang dapat memperjelas apakah desentralisasi fiskal yang diterapkan akan benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai objek penelitian. Peneliti memilih Provinsi Riau sebagai objek penelitian karena Provinsi Riau dengan

kapasitas fiskal yang tinggi, bahkan tertinggi se-Pulau Sumatera dengan indeks 1,1867 pada tahun 2014, serta didukung oleh potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, ternyata memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah se-Pulau Sumatera. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Riau)."

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan agar penelitian dapat fokus dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Wilayah Provinsi Riau.
2. Fokus penelitian adalah pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan baik yang tertulis dalam bentuk dokumen atau catatan resmi lainnya.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Riau.
2. Pengaruh DP terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Riau.
3. Pengaruh TK terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Riau.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori-teori di bidang keuangan publik.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah penelitian. Selain itu juga akan diuraikan tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan konsep dan hasil penelitian menyangkut desentralisasi fiskal di Indonesia, hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, tenaga kerja, dan produk domestik regional bruto. Selain itu penulis akan menjelaskan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang digunakan, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang desain penelitian, variabel-variabel penelitian yang digunakan, model persamaan regresi, dan definisi operasional. Selain itu penulis akan menjelaskan tentang jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penulis juga akan memberikan saran yang dapat menjadi masukan bagi objek penelitian.